

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, E., Kumenaung, A., & Kawung, G. (2015). Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(1), 1–12. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/6258>
- Armaja, Ibrahim, R., dan A. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). *Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2018*. 1–74. <https://doi.org/7203007.34>
- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmelli. (2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika 2017*, 12(2), 67–76.
- Darise, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: Indeks.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hehamahua, H. (2014). Analisis APBD Kota Surabaya Suatu Kajian Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah. *Media Trend, Volume 9 N(Maret)*, 54–68.
- Kabupaten Kulon Progo. *Peraturan Bupati Nomor Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Tata Kerja Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah*.
- Kabupaten Bantul. *Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah*.
- Kabupaten Gunung Kidul. *Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah*.
- Kabupaten Sleman. *Peraturan Bupati Nomor 38.23 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah*.
- Kota Yogyakarta. *Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah*.

- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Nuansa, Volume 14*, 123–138. <https://doi.org/10-19105>
- Korompot, R., & Warongan, J. (2018). Analysis of Financial Performance in the Government of North Sulawesi. *Accountability, 6*(2), 9. <https://doi.org/10.32400/ja.17755.6.2.2017.9-19>
- Kota, K. (2014). Daerah Terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Anak Agung Istri Agung Swandewi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Email : anakagungistriswandewi@gmail.com Sis. 7*, 356–376.
- Kota Yogyakarta. *Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.*
- Kristiyanto, S., & Widodo, S. (2017). Analisis Efisiensi Belanja Langsung Dan Tidak. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 17*(1), 1–12.
- Lontaan, I. C., Pangerapan, S., Sam, U., & Manado, R. (2014). Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014 *Analysis of Regional Expenditure in Minahasa Local Government Fiscal. 4*(1), 898–906.
- Maga, F. F., Tolosang, K. D., Lapian, L. C., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2016). The Effect Of Direct Expenditure and Indirect Expenditure. *Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah. 16*(01), 1–11.
- Mahardika, I., & Sri Artini, L. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 3*(3), 733–750.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Kedu). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhtarom, A. (2015). Analisis Pad (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekbis, 13*(1), 9. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v13i1.118>
- Nugraha, P. C. (2017). Analisa Index Perhitungan Ratio Anggaran Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta Periode Tahun 2007 Sampai Dengan 2011. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis, 5*(1), 94–108.

- Nurhayati. (2015). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah kabupaten rokan hulu 1). *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(33).
- Priyono, J. D. B., Arjuliwondo, Anggarini, C. B., Sugiarti, & Setyaningsih, T. (2017). *Statistik Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2016*. 1–58.
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256.
- Putri, Z. E. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Esensi*, 5(2), 203–214. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2340>
- Ramadhani, F. R. (2016). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vo.14.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2018). Analisis kemandirian keuangan daerah. *Inovasi*, 13(2), 92. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2461>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Sanuari, A. (2015). *Jurnal Keuda Vol. 2 No. 3. Keuda*, 2(3), 1–17. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2007.01616.x>
- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 5(3), 1515–1534. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9215>

- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitompul, M. A. L. (2017). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 1(1), 1–10. Retrieved from <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/547>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suranta, S., Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 111–124. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.284>
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>